

INTISARI

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI SLEMAN

Oleh:

Alda Awwalil Hasani¹, Oce Madril²

Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme serta pengawasan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus dengan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder hingga tersier yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di Sleman ini mengandung dua jenis tindakan pemerintah yakni tindakan pemerintah dalam hukum publik yang berupa izin serta tindakan pemerintah dalam hukum privat dalam bentuk perjanjian kerja sama. Selain itu, hasil penelitian lainnya adalah berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan terhadap pemanfaatan data kependudukan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan internal, yang berupa pengawasan melekat maupun pengawasan atasan langsung, serta pengawasan preventif, yang berupa pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran atas pemanfaatan data kependudukan.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Data Kependudukan, Pengawasan.

¹ Mahasiswa Starta-1 (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

JURIDICIAL REVIEW OF USING POPULATION DATA FOR PUBLIK SERVICE IN SLEMAN

Authors:

Alda Awwalil Hasani³, Oce Madril⁴

This research studies on the mechanism and control of the use of population data for public services in Sleman. This research uses a statutory approach and concepts, and cases with this type of research in the form of normative juridical research. Data used in this research is secondary data obtained from legal materials, there are primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal material then analyzed by qualitative descriptive method.

The results showed that the mechanism of population data for public services in Sleman contained two types of government actions, there are government actions in public law in the form of permits and government actions in private law in the form of agreements. The other result of research is related with control of the use of population data. The controls which are internal control, in the form of inherent control and direct supervisor control, and preventive control, in the form of regulations related to sanctions for violations of the use of population data.

Keywords: Use, Population Data, Control

³ Undergraduate Student of Administration State Law Departement at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Lecturer of Administrative State Law Departemen at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta